

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Bencana

2.1.1 Pengertian Bencana

Bencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang menyebabkan dan/atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, dan bahaya. Pengertian bencana juga diperjelas dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, yaitu bencana merupakan kejadian atau serangkaian insiden yang menimbulkan gangguan terhadap kehidupan serta mata pencaharian masyarakat, yang dapat disebabkan oleh unsur alam, non-alam, atau kesalahan manusia. Dampak dari kejadian ini bisa meliputi jatuhnya korban jiwa, kerusakan ekosistem, kerugian materi, hingga tekanan psikologis. Mengacu *United Nation Development Program (UNDP)* “bencana adalah suatu kejadian yang sangat ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang merugikan kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas” (Ramli, 2010:50). Pengertian bencana menurut Ramli sebagai berikut: Bencana dipahami sebagai suatu kejadian luar biasa yang tidak bisa dikendalikan oleh sumber daya maupun material yang tersedia di lokasi kejadian, sehingga mengancam keselamatan jiwa, aset fisik, dan keseimbangan lingkungan hidup (Ramli, 2010).

2.1.2 Karakteristik Bencana dan Jenis Bencana

Secara garis besar, bencana dikalsifikasikan menjadi tiga berdasarkan jenis, kemampuan mengelola, dan kecepatan kejadiannya. Bencana berdasarkan jenisnya

dibagi menjadi tiga (bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial). Konsep bencana menurut (Zarina Akbar, Ernita Zakiah, 2022) yaitu:

1. Bencana Alam

Bencana alam yakni bencana dikarenakan oleh kejadian atau suatu peristiwa yang diakibatkan oleh alam.

a. Bencana Alam Geologis

1) Gempa Bumi

Getaran permukaan bumi diakibatkan oleh benturan lempeng bumi, patahan aktif, gunung api, maupun runtuhannya batuan sehingga menyebabkan getaran partikel tanah dan batuan yang menyebabkan guncangan.

2) Tsunami

Naiknya gelombang air laut yang sangat besar, dihasilkan oleh perubahan vertikal massa air yang diakibatkan oleh gangguan massa air laut dalam (palung) secara tiba-tiba.

3) Gunung Meletus

Aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi” yang disebabkan oleh gunung berapi aktif.

4) Tanah Longsor

Gerakan massa tanah atau batuan, ataupun campuran keduanya, yang menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

5) Abrasi

Pengikisan daratan oleh air laut atau tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

b. Bencana Alam Klimatologis

1) Banjir

Banjir adalah luapan air yang besar dari sebuah badan air (Sungai, selokan, kanal, dan bendungan), sehingga menggenangi daerah sekitarnya.

2) Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan banjir besar yang mengalir dan menghanyutkan banyak materiel seperti air, pasir, tanah, batu, lumpur, dan kayu yang bergerak ke dataran lebih rendah.

3) Kekeringan

Ketidak tersediaan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan dalam jangka waktu yang cukup panjang ditambah keadaan iklim yang panas.

4) Angin Puting Beliung

Fenomena angin kencang yang ekstrem dan berputar dengan kecepatan tinggi lalu bergerak secara acak membentuk jalur sempit. Angin ini ditandai dengan awan gelap dan diiringi dengan hujan deras serta petir.

5) Kebakaran Lahan dan Hutan

Perubahan iklim global yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Indonesia itulah yang menjadi faktor pemicu kebakaran lahan dan hutan.

c. Bencana Alam Ekstra-*Terrestrial*

Bencana alam yang terjadi di luar angkasa, seperti hantaman benda langit, badai matahari, dan lain-lain yang apabila terjadi dapat mengganggu kehidupan manusia di muka bumi.

2. Bencana Non-Alam

Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, seperti: gagal teknologi, epidemi, kebakaran, kecelakaan, konflik sosial, dan lain-lain.

2.1.3 Dampak Bencana

Bencana tentunya memberikan dampak tidak hanya pada manusia, tetapi juga alam sekitarnya di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, psikologis, dan lain-lain. Dalam KBBI kerugian berdefinisi memikul rugi, kerugian yang diakibatkan oleh bencana yaitu memikul rugi akibat adanya bencana yang belum diketahui pasti besarnya.

Pengertian lain menjelaskan kerugian yang disebabkan bencana mencakup berbagai komponen contohnya banyaknya korban jiwa, jumlah kerusakan bangunan, biaya yang harus dikeluarkan transportasi, dan infrastruktur lainnya, jumlah penduduk yang kehilangan rumah, dan lain-lain (Raimi, 2017).

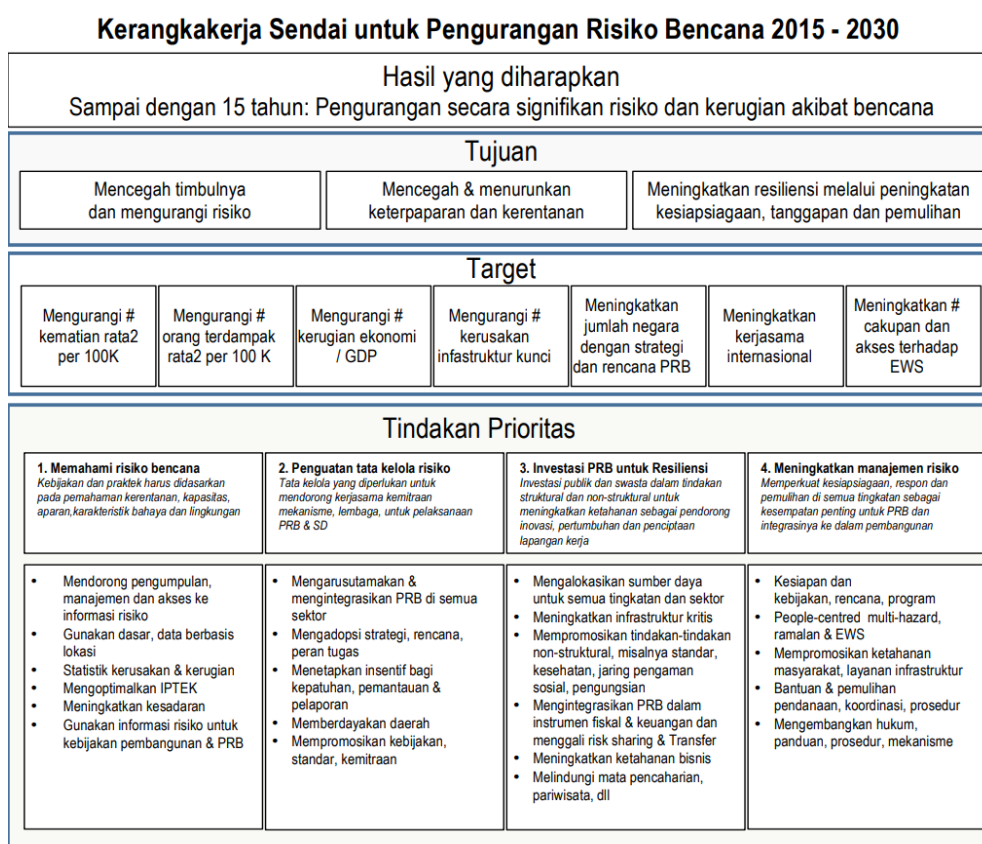
2.1.4 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah sebuah rangkaian usaha yang dilaksanakan guna meminimalisir risiko, dampak, juga kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Penanggulangan bencana adalah alur sistemis memanfaatkan hasil administratif, potensi oprasional, organisasi, penerapan, teknik, serta kapasitas warga untuk meminimalisir ancaman atau (Lassa *et al.*, 2022).

Tahapan atau upaya dalam penanggulangan bencana ialah upaya pencegahan (*prevention*) yaitu upaya pencegahan guna mencegah kejadian bencana, walau pencegahan telah dilaksanakan dan kemungkinan terjadi bencana tetap ada sehingga perlu usaha mitigasi (*mitigation*) atau usaha guna memperkecil efek dari bencana. Upaya berikutnya ialah kesiagaan (*preparedness*) yakni upaya dalam melakukan aksi pengantisipasi bencana dengan tepat, efektif, dan siaga. Tindakan kesiapsiagaan seperti ini melakukan penguatan sisten peringatan guna menginformasikan tanda jika kemungkinan bencana akan terjadi. Upaya selanjutnya ialah tanggap darurat (*response*) yaitu usaha tindakan segera saat terjadi bencana dalam mengatasi efek dan mengurangi dampak yang lebih besar. Upaya pemulihan (*recovery*) ialah keadaan di mana memfungsikan kembali lingkungan yang terkena dampak seperti keadaan semula, upaya dalam jangka pendek seperti upaya rehabilitasi, dan upaya jangka panjang rekonstruksi. (Lassa *et al.*, 2022).

2.1.5 Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana

Kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030 adalah dokumen Internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada konferensi dunia ketiga tentang pengurangan risiko bencana di Sendai, Jepang pada tanggal 8 Maret 2015. Kerangka kerja Sendai ialah instrumen turunan dari kerangka aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action 2005-2015*). Kerangka kerja Sendai menekankan pada manajemen risiko bencana berfokus pada pencegahan risiko terbaru, meminimalisir risiko yang ada, meningkatkan ketangguhan, dan tanggung jawab bangsa guna mengatasi dan meminimalisir risiko bencana serta melibatkan semua instansi warga dan negara. (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 United Nation, 2015*).



Gambar 2.1 Kerangka Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030
Sumber: Badan National Penanggulangan Bencana

2.2 Kajian Tentang Kampung Siaga Bencana

2.2.1 Pengertian Kampung Siaga Bencana

Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah tempat penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana (Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana). Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk mengembangkan kesadaran juga menambah kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah setempat/rawan bencana. Tim KSB penting untuk mempersiapkan kegiatan baik sebelum bencana, pada saat, dan pasca bencana, sebagai bagian tak terpisahkan antar tahap satu dengan tahap *lainnya* (*Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana, 2011*).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011, KSB dibentuk dengan tujuan untuk menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan risiko dan ancaman bencana. Selain itu, KSB bertugas membangun jaringan kewaspadaan berbasis komunitas, memperkuat solidaritas sosial, melatih masyarakat tanggap terhadap bencana, memastikan keberlanjutan kesiapsiagaan berbasis warga. KSB diimplementasikan di daerah-daerah rawan bencana dengan pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Konsep KSB adalah pemberdayaan masyarakat yang mencakup aspek pendidikan dan pelatihan, pembentukan struktur organisasi tanggap darurat di lingkungan, dan penguatan koordinasi antarwarga. Kampung Siaga Bencana juga

bertujuan untuk menanamkan nilai kemandirian di masyarakat, sehingga mereka siap menghadapi situasi darurat secara mandiri (Nugroho, 2019).

2.2.2 Desain dan Strategi Implementasi Kampung Siaga Bencana

Identifikasi beberapa Desain implementasi Kampung Siaga Bencana, antara lain; Desain Partisipatif: Dalam Desain ini, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Desain partisipatif bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat, sehingga mereka lebih aktif dalam menjalankan program. Desain *Top-Down*: Pemerintah yang memimpin seluruh proses, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan program. Dalam Desain ini, keterlibatan masyarakat relatif lebih terbatas. Desain Kolaboratif: Gabungan dari pendekatan partisipatif dan *top-down*, di mana peran pemerintah, LSM, dan masyarakat saling melengkapi untuk menciptakan kesiapsiagaan bencana yang lebih efektif (Santoso, 2018).

2.2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Kampung Siaga

Bencana

Keberhasilan program Kampung Siaga Bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti; Dukungan Pemerintah: keterlibatan dan dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberlanjutan program KSB. Dukungan ini meliputi anggaran, fasilitasi pelatihan, dan penyediaan alat-alat darurat. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam program ini sangat penting. Warga yang berpartisipasi lebih cenderung memiliki rasa kesadaran/kepedulian akan risiko bencana, yang kemudian memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kolaborasi Antar Pihak: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga

swadaya masyarakat (LSM) merupakan faktor yang signifikan dalam keberhasilan program KSB. Kolaborasi ini menciptakan sinergi dalam pengelolaan risiko bencana (Pratomo, 2020).

2.3 Kajian Tentang Desain Penguatan

2.3.1 Pengertian Desain Penguatan

Desain penguatan merupakan kerangka kinerja atau pendekatan sistematis yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam memperoleh kontrol, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Desain ini memiliki tujuan utama untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mereka dapat bertindak mandiri dan efektif.

Desain Penguatan Menurut Jim Ief menekankan bahwa penguatan komunitas harus berangkat dari kesadaran sosial yang kritis. Jim Ief berpendapat bahwa untuk memberdayakan komunitas, anggota komunitas harus bekerja bersama masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan membantu mereka menggunakan kekuatan lokal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pandangannya, Desain ini mengutamakan pendekatan partisipatif, di mana komunitas memiliki suara dalam setiap langkah, sehingga permasalahan dapat diatasi secara berkelanjutan (Ife, 2013).

Penguatan komunitas sebagai proses pemberian kekuatan, otonomi, dan kapasitas kepada komunitas agar dapat meningkatkan hidup mereka. Adams menekankan pentingnya kontrol, partisipasi, dan kesadaran kritis sebagai elemen

utama dalam penguatan komunitas, serta perlunya dukungan dan pengembangan keterampilan untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Adams, 2003). Dengan demikian secara keseluruhan, Desain penguatan berupaya menciptakan perubahan positif dengan cara mendorong individu atau komunitas untuk memiliki kontrol yang lebih besar, mengenali dan menggunakan kekuatan mereka, serta berperan aktif dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

2.3.2 Konsep Desain Penguatan

Konsep Desain Penguatan merupakan salah satu pendekatan suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan. Dimana konsep Desain Penguatan ini yakni suatu pendekatan praktis untuk membangun komunitas yang berdaya, di mana Desain ini tidak hanya tentang memperbaiki kehidupan individu tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendasar. (Ife, 2013) dalam bukunya yang berjudul *Community Development in an Uncertain World* menjelaskan beberapa dalam konsep kunci mengenai Desain penguatan antara lain:

1. Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Pemberdayaan

Setiap komunitas memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, layanan, dan peluang.

2. Keadilan Sosial dan Struktur Kekuasaan

Desain Penguatan tidak hanya berarti memberi kontrol atau otonomi kepada komunitas, tetapi juga menciptakan perubahan dalam struktur kekuasaan yang memungkinkan komunitas untuk bersuara dan memengaruhi kebijakan yang berdampak pada mereka.

3. Partisipasi Aktif dan Demokrasi Partisipatif

Dalam Desain ini, komunitas tidak hanya menjadi penerima bantuan atau manfaat, tetapi menjadi aktor utama dalam proses perubahan. Ia mendorong penerapan demokrasi partisipatif, di mana setiap individu dalam komunitas memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

4. Kesadaran Kritis dan Transformasi Sosial

Komunitas harus memahami sistem sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah untuk mengubah kondisi yang tidak adil. Kesadaran kritis adalah proses untuk mengenali, memahami, dan menghadapi hambatan yang ada dalam masyarakat.

5. Pengembangan Kapasitas Lokal dan Sumber Daya Komunitas

Memberikan keterampilan, pengetahuan, dan alat yang dibutuhkan bagi komunitas untuk menghadapi tantangan dan mengambil tindakan yang efektif. Dengan adanya Desain penguatan ini harus mendorong penggunaan sumber daya lokal dan meningkatkan ketahanan komunitas.

6. Keberlanjutan dan Kemandirian

Desain Penguatan bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi upaya untuk menciptakan perubahan berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan komunitas pada pihak luar. Ia menekankan pentingnya kemandirian, di mana komunitas dapat mengatasi masalahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya dan jaringan yang telah dibangun.

7. Pendekatan Holistik dan Budaya yang Sensitif

Pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan keunikan tiap komunitas dengan cara yang menghargai keberagaman budaya, serta menggunakan pendekatan holistik yang melihat komunitas sebagai satu kesatuan yang kompleks.

2.4 Kajian Tentang Partisipasi Kolaboratif

2.4.1 Pengertian Partisipasi Kolaboratif

Partisipasi kolaboratif merupakan salah satu pendekatan yang berasal dari Desain pemberdayaan, di mana partisipasi kolaboratif dalam konteks pemberdayaan ini merupakan proses di mana individu atau kelompok diberikan kesempatan dan dukungan untuk aktif berkontribusi dalam keputusan dan tindakan yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri atau pada komunitas mereka. Desain pemberdayaan ini bertujuan agar setiap individu merasa memiliki peran penting, yang pada akhirnya meningkatkan rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan kemandirian.

Julian Rappaport 1984, berpendapat bagaimana komunitas dapat mengembangkan kendali atas kehidupan mereka melalui keterlibatan aktif dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Menurut Rappaport, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan komunitas tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial yang berkelanjutan melalui kerjasama antara anggota masyarakat, peneliti, dan pihak-pihak lain yang terkait. Definisi partisipasi kolaboratif menurut Wenger sebagai berikut: Partisipasi kolaboratif sebagai keterlibatan aktif dalam

Communities Of Practice (komunitas praktik) di mana anggota berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik, serta bekerja sama untuk mencapai pemahaman dan hasil yang lebih baik (Wenger, 1998). Arnstein mendefinisikan partisipasi kolaboratif sebagai tahap di mana warga memiliki kekuatan nyata dalam memengaruhi keputusan melalui keterlibatan aktif dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan kemitraan sejati antara warga dan pemerintah atau otoritas (Arnstein, 1969).

Dengan demikian secara keseluruhan definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif mencakup berbagai bentuk keterlibatan aktif di mana semua pihak bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan komunitas.

2.4.2 Manfaat dan Tantangan Pendekatan Partisipasi Kolaboratif

Pendekatan partisipasi kolaboratif memiliki manfaat dan tantangan, adapun manfaat dan tantangan partisipasi kolaboratif yang disampaikan oleh (Julian Rappaport, 1984) sebagai berikut, Manfaat: Peningkatan Rasa Memiliki dan Kontrol: Partisipasi kolaboratif meningkatkan rasa memiliki karena masyarakat terlibat langsung dalam inisiatif yang mereka jalankan, sehingga merasa lebih bertanggung jawab. Pengembangan Daya Tahan Komunitas: Komunitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan solusi membangun daya tahan terhadap tantangan di masa depan. Pengembangan Kemandirian dan Kepercayaan Diri: Melalui pemberdayaan, komunitas tidak lagi tergantung pada pihak luar tetapi memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah mereka sendiri. Tantangan: Dinamika Kekuasaan dalam Komunitas: Partisipasi kolaboratif dapat menghadapi

hambatan dalam bentuk konflik kekuasaan atau ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hal ini menuntut pengelolaan yang hati-hati agar semua suara bisa didengar dan dihargai. Keterbatasan Sumber Daya dan Waktu: Tidak semua komunitas memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung proses kolaborasi ini. Komitmen jangka panjang dari semua pihak juga penting, karena proses ini memerlukan waktu untuk melihat hasil yang berkelanjutan. Perubahan Pola Pikir: Pendekatan partisipasi kolaboratif menuntut pergeseran pola pikir, terutama bagi komunitas yang terbiasa bergantung pada bantuan eksternal. Proses ini membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan mereka sendiri.

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rappaport di atas bahwa pendekatan partisipasi kolaboratif memiliki manfaat dan juga tantangannya, manfaatnya yang disampaikan Rappaport ialah anggota komunitas memiliki rasa memiliki dan kendali atas komunitasnya karena anggota komunitas juga terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di komunitas, selain pada itu juga dengan partisipasi kolaboratif akan menjadikan komunitas lebih kuat. Tantangan diantaranya terkadang perbedaan pendapat juga dapat menimbulkan konflik di dalam komunitas.

2.5 Pengembangan Kapasitas Masyarakat

2.5.1 Pengertian Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Pengembangan kapasitas masyarakat atau *Community capacity building* adalah proses untuk mengembangkan keterampilan, kompetensi, pengetahuan,

kekuatan, mengatasi tantangan, meningkatkan kesejahteraan untuk mengambil kendali terhadap kehidupan mereka atau untuk mencapai tujuan bersama (Noya et al., 2009). Pada dasarnya *Community capacity building* diterapkan pada komunitas yang dianggap memiliki masalah kesejahteraan baik itu akibat dari adanya suatu kebijakan, perubahan sosial, atau akibat lainnya yang berdampak pada komunitas itu sendiri.

2.5.2 Elemen dan Prinsip dalam Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Elemen-elemen utama dalam *Community capacity building* yang disampaikan oleh Garlick dalam (McGinty, 2002) sebagai berikut; pengembangan pengetahuan: kapasitas untuk meningkatkan keterampilan, memanfaatkan penelitian dan pengembangan, serta mendorong pembelajaran, kepemimpinan: kapasitas untuk mengembangkan arah bersama dan mempengaruhi apa yang terjadi, membangun jejaring: kapasitas untuk membentuk kerja sama atau kemitraan, menghargai masyarakat dan kapasitas masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan, informasi pendukung: kapasitas untuk mengumpulkan, mengakses, dan memanfaatkan informasi yang berkualitas.

Prinsip-prinsip utama di dalam *Community capacity building* yang disampaikan oleh (McGinty, 2002) komunitas harus memiliki kendali atas keputusan yang dapat mempengaruhi mereka dan bertindak untuk perubahan positif, partisipasi aktif dari anggota komunitas guna memunculkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dirancang, pengembangan kapasitas harus berorientasi jangka panjang dan tidak bergantung pada bantuan dari eksternal secara terus menerus, kesetaraan dan inklusivitas

bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa memandang status sosial, gender, latar belakang ekonomi, penggunaan sumber daya lokal dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia di dalam komunitas, transparansi dan akuntabilitas setiap program yang dirancang harus dilakukan secara transparan dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sudah efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

2.6 Kajian Tentang Pilar Sosial

Pilar Sosial dalam penelitian ini adalah salah satu partisipan dalam penelitian yang dilakukan yang di mana Kampung Siaga Bencana desa Cintaasih melakukan kolaborasi bersama Pilar Sosial untuk menyusun rencana kerja secara partisipasi kolaboratif.

2.6.1 Pengertian Pilar Sosial

Pilar-pilar sosial dalam konteks kesejahteraan sosial mencakup tenaga dan unsur masyarakat yang memiliki tugas untuk mendukung, mendampingi, dan memperkuat masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Pilar-pilar ini memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas sosial, membantu masyarakat rentan, dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap program kesejahteraan sosial. Pilar-pilar sosial ini penting untuk memastikan bahwa program-program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan efektif dan mencapai masyarakat yang membutuhkan (Siregar, 2001).

2.6.2 Elemen dalam Pilar Sosial

Elemen dalam pilar-pilar sosial adalah TAGANA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Pendamping Sosial, SDM Pendamping PKH dan Karang Taruna. Berikut penjelasan mengenai pilar-pilar sosial menurut (Rahmawati, 2022) sebagai berikut Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah sukarelawan sosial yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk melakukan penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia. Anggota TAGANA terdiri dari masyarakat yang memiliki kesiapan untuk membantu korban bencana mulai dari tahap mitigasi, evakuasi, hingga pemulihan pascabencana. Peran TAGANA sangat penting karena mereka berfungsi sebagai respons cepat dalam memberikan pertolongan pertama dan membantu menstabilkan kondisi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, TAGANA juga aktif dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah tenaga kesejahteraan sosial yang bertugas di tingkat kecamatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Peran utama TKSK adalah mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). TKSK berperan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program-program kesejahteraan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Mereka juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah anggota masyarakat yang secara sukarela membantu dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan. PSM bertugas untuk mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat, memberikan dukungan sosial, dan membantu implementasi program kesejahteraan sosial. PSM memainkan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam mendeteksi masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, mereka membantu pemerintah untuk lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat yang berada di tingkat akar rumput.

Pendamping Sosial adalah tenaga profesional yang bertugas untuk mendampingi penerima manfaat program sosial dalam mengakses bantuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pendamping sosial memiliki tugas untuk membimbing, mendampingi, dan memastikan bahwa penerima manfaat memahami serta memanfaatkan bantuan yang diberikan secara efektif. Misalnya, dalam Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping sosial berperan sebagai fasilitator dan edukator untuk membantu keluarga dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi (Nugroho, 2021). Mereka juga membantu dalam pemantauan dan pelaporan kondisi keluarga penerima manfaat kepada pihak berwenang.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping PKH adalah tenaga khusus yang dilatih untuk mendampingi keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH memiliki tugas untuk memastikan bahwa keluarga penerima manfaat mendapatkan manfaat yang optimal dari program ini, termasuk memantau perkembangan kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi mereka. Peran pendamping PKH sangat krusial dalam memastikan program ini tepat sasaran, karena mereka melakukan verifikasi dan monitoring langsung terhadap penerima manfaat di lapangan. Dengan demikian, mereka membantu dalam mengurangi ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan, melalui pendekatan yang mendorong kemandirian.

Karang Taruna adalah organisasi sosial yang tumbuh di masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Karang Taruna organisasi sosial berbasis kepemudaan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial (Setiani et al., 2022). Karang Taruna memiliki tanggung jawab untuk menyadarkan pemuda dalam berorganisasi, dan diharapkan mampu dalam membantu pembangunan kesejahteraan pada tingkat Desa atau kelurahan.

2.7 Teknologi Partisipasi

Teknologi partisipasi merupakan metode yang peneliti gunakan dalam menyusun rencana kerja secara partisipasi kolaboratif bersama Kampung Siaga Bencana Desa Cintaasih dan Pilar Sosial (TAGANA dan TKSK).

2.7.1 Pengertian Teknologi

Teknologi Partisipasi atau *Technology of Participation* adalah suatu metode fasilitasi untuk membantu kelompok dalam pengambilan keputusan secara partisipatif. Memfasilitasi kelompok *Technology of Participation* mengeksplorasi munculnya sikap kepemimpinan, munculnya inisiatif-inisiatif, keputusan dan tanggung jawab seluruh anggota (Agustang, 2006).

2.7.2 Metode dalam Teknologi Partisipasi

Metode dasar teknologi partisipasi atau *Technology of Participation* yaitu metode diskusi, metode *workshop*, dan perencanaan tindakan (*action plan*). Metode dasar teknologi partisipasi juga dijelaskan oleh (Agustang, 2006) dalam buku *Teknologi Partisipasi Metode Fasilitasi Pembuatan Keputusan Partisipatif*, sebagai berikut:

1. Metode Diskusi

Digunakan untuk topik yang umum, untuk berbagi pengalaman, memperdalam wawasan atau suatu masalah.

2. Metode *Workshop*

Membangun kesepakatan kelompok, fokus kepada keputusan dan tindakan, menghasilkan rencana tindak.

3. Metode Perencanaan

Dilakukan jika sudah ada kesepakatan

4. Tindakan

Menghasilkan rencana tindak

Metode Diskusi di dalam teknologi partisipasi atau *Technology of Participation* dilakukan menggunakan pendekatan *Objective Reflektif Interpretatif Decional* (ORID). Metode diskusi ORID digunakan untuk mempermudah komunikasi suatu kelompok. Penjelasan alur proses diskusi ORID dijelaskan oleh (Agustang, 2006) sebagai berikut:

1. Mendefinisikan tujuan

Penentuan tujuan obyektif dan eksperimental pada diskusi. Tujuan Obyektif: apa saja yang hendak diketahui, dipahami atau diputuskan dalam diskusi. Tujuan Eksperimental bagaimana situasi dan interaksi antar peserta yang ingin dialami oleh peserta selama proses diskusi atau isu atau pengalaman apa yang ingin dialami oleh kelompok.

2. Pembukaan dan penjelasan konteks masalah

Seluruh anggota harus ikut serta secara partisipatif dan menjelaskan kepada seluruh anggota atau peserta mengenai konteks masalah atau topik yang akan di diskusikan.

3. Tahap Obyektif

Diskusi pada tahap obyektif bertujuan untuk mendapatkan fakta dan data dari setiap anggota atau peserta diskusi. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah apa yang diketahui, dilihat, didengar, dibaca atau diingat oleh peserta mengenai topik yang dibahas (berupa fakta dan data) dan Pengalaman apa yang pernah dialami oleh peserta dan relevan dengan topik yang dibahas (kapan, kejadian apa, di mana).

4. Tahap Reflektif

Tahap reflektif pertanyaan yang diajukan mengenai respons emosional peserta atas fakta dan data yang telah didapat pada tahap obyektif.

5. Tahap Interpretatif

Pada tahap ini fasilitator mengajukan pertanyaan sebab akibat atau pertanyaan analisa, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menumbuhkan pemikiran kritis peserta.

6. Tahap *Decisional*

Pada tahap ini fasilitator mengajak dan memotiviasi kelompok untuk membuat keputusan berdasarkan hasil hasil pada tahap sebelumnya. Fasilitator memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberi inspirasi kepada peserta atau anggota untuk membuat keputusan.

7. Konfirmasi dan Penutup

Lakukan *review* sekali lagi pada setiap poin-poin penting yang disepakati maupun diterima dalam diskusi. Telusuri sejarahnya, mulai dari bagaimana poin tersebut diusulkan, dibahas dan disepakati. Tanyakan pada forum apakah ada yang salah atau kurang memuaskan dalam proses diskusi, catat setiap keberatan.

Metode *workshop* digunakan untuk pembuatan keputusan dalam kelompok. Menurut (Agustang, 2006) metode *workshop* digunakan bila kelompok menginginkan keputusan terhadap masalah atau rencana tindak. Metode ini juga digunakan untuk memberi ruang bagi setiap anggota kelompok untuk berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan, memberi kesadaran akan tanggung jawab, menyusun ide-ide menjadi satu pemikiran.

Metode perencanaan tindakan digunakan untuk membuat rencana tindakan yang akan dilakukan oleh kelompok, hal terpenting dalam metode perencanaan ialah memastikan masing-masing anggota kelompok bertanggungjawab

melaksanakan tugas dan memastikan anggota kelompok dapat melaksanakan tugas. (Agustang, 2006) menekankan bahwa proses tidak berhenti hanya pada perencanaan. Tetapi, yang lebih penting, adalah rencana yang dihasilkan dijamin dapat diimplementasikan.